

Dari *Corporate Governance* ke *Cooperative Governance*: Posisi dan Peran Audit dalam Literatur Tata Kelola Koperasi (A *Systematic Literature Review*)

Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra¹, Innas Susantira Katurini²

^{1,2}Universitas Koperasi Indonesia

¹toufiq_agung@ikopin.ac.id, ²innassusantira@ikopin.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 13 Desember 2025

Disetujui 6 Januari 2026

Diterbitkan 25 Januari 2026

Kata kunci:

Audit Koperasi;
Cooperative Governance;
Corporate Governance;
Tata Kelola Koperasi

Keywords :

Cooperative Audit;
Cooperative Governance;
Corporate Governance;
Cooperative Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan posisi dan peran audit dalam literatur tata kelola koperasi serta menganalisis dominasi paradigma *corporate governance* dalam kajian audit koperasi melalui pendekatan *Systematic Literature Review*. Studi dilakukan dengan mengikuti pedoman PRISMA terhadap artikel jurnal ilmiah periode 2021–2025 yang relevan dengan audit dan tata kelola koperasi. Dari proses seleksi bertahap, diperoleh 20 artikel yang dianalisis menggunakan analisis tematik, paradigmatik, dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literatur tata kelola koperasi masih didominasi perspektif *corporate governance*, sehingga audit umumnya diposisikan sebagai mekanisme kontrol manajerial dan pelaporan keuangan. Peran audit sebagai instrumen akuntabilitas kolektif, legitimasi sosial, dan penguatan demokrasi anggota belum terartikulasikan secara sistematis. Temuan juga menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan *hybrid governance*, namun kerangka *cooperative governance* belum berkembang sebagai paradigma mandiri. Penelitian ini menegaskan perlunya reposisi audit dalam koperasi sebagai mekanisme tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kontrol, tetapi juga pada partisipasi anggota dan nilai demokrasi ekonomi. Secara teoretis, studi ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual audit berbasis *cooperative governance* serta memberikan agenda riset masa depan bagi kajian tata kelola koperasi.

ABSTRACT

This study aims to map the position and role of auditing in the cooperative governance literature and to analyze the dominance of the corporate governance paradigm in cooperative auditing studies through a *Systematic Literature Review*. The study followed the PRISMA guidelines for scientific journal articles published from 2021 to 2025 that are relevant to auditing and cooperative governance. From a gradual selection process, 20 articles were obtained and analyzed using thematic, paradigmatic, and conceptual synthesis analysis. The results show that the cooperative governance literature remains dominated by the corporate governance perspective, positioning auditing primarily as a mechanism for managerial control and financial reporting. The role of auditing as an instrument of collective accountability, social legitimacy, and strengthening member democracy has not been systematically articulated. The findings also show a tendency toward a hybrid governance approach, but the cooperative governance framework has not yet developed as an independent paradigm. This study emphasizes the need to reposition auditing in cooperatives as a governance mechanism that is not only oriented toward control but also toward member participation and values of economic democracy. Theoretically, this study contributes to the development of a conceptual framework for auditing based on cooperative governance and provides a future research agenda for the study of cooperative governance.



©2026 Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra, Innas Susantira Katurini. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang memiliki karakteristik tata kelola berbeda secara fundamental dari perusahaan kapitalistik. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada struktur kepemilikan, tetapi juga pada prinsip dasar yang menekankan demokrasi anggota, partisipasi, dan orientasi kesejahteraan kolektif. Dalam kerangka ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang merepresentasikan kepentingan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Namun, dalam perkembangan literatur akademik, koperasi sering dipahami melalui kerangka *corporate governance* yang dikembangkan dalam konteks perusahaan modern. Akibatnya, koperasi diposisikan sebagai entitas korporasi yang dimodifikasi, bukan sebagai

organisasi ekonomi dengan logika kelembagaan yang khas. Dominasi kerangka *corporate governance* dalam studi koperasi menunjukkan bahwa literatur tata kelola koperasi masih berada dalam bayang-bayang paradigma korporasi, sehingga karakteristik khas *cooperative governance* belum terartikulasikan secara memadai dalam kajian ilmiah.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tata kelola koperasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi, keberlanjutan institusi, dan kepercayaan anggota. Jamaluddin R. A. et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik tata kelola koperasi sering mengadopsi prinsip-prinsip *governance* yang berasal dari model korporasi, meskipun konteks kelembagaan koperasi berbeda secara substansial. Temuan ini mengindikasikan bahwa *cooperative governance* belum berkembang sebagai paradigma yang mandiri dalam literatur akademik. Selain itu, studi tentang koperasi menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, kapasitas manajerial, dan mekanisme pengawasan internal. Keterbatasan sistem pengendalian dan tata kelola menjadi tantangan utama dalam pengelolaan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola koperasi tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan manajerial, tetapi juga melalui perspektif kelembagaan dan sosial.

Dalam konteks tata kelola tersebut, audit umumnya diposisikan sebagai mekanisme kontrol keuangan dan pengawasan terhadap manajemen. Perspektif ini selaras dengan logika *corporate governance* yang menempatkan audit sebagai instrumen mitigasi risiko dan pengendalian manajerial. Namun, struktur kelembagaan koperasi tidak sepenuhnya sejalan dengan asumsi relasi prinsipal–agen dalam *corporate governance*. Anggota koperasi berperan sekaligus sebagai pemilik, pengguna jasa, dan pengendali organisasi, sehingga relasi kekuasaan dan akuntabilitas dalam koperasi bersifat lebih kompleks. Oleh karena itu, pemaknaan audit dalam koperasi tidak dapat direduksi menjadi fungsi monitoring semata. Audit dalam koperasi memiliki potensi peran yang lebih luas, mencakup akuntabilitas kepada anggota, legitimasi sosial organisasi, serta penguatan demokrasi internal. Namun, dimensi tersebut belum terartikulasikan secara sistematis dalam literatur audit koperasi.

Literatur tentang koperasi dan organisasi ekonomi berbasis anggota menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan mekanisme pengawasan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi. Freire & Gonçalves (2022) menunjukkan bahwa tata kelola organisasi ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan efektivitas manajerial dan keberlanjutan organisasi. Namun, sebagian besar studi masih menggunakan pendekatan manajerial yang berorientasi pada efisiensi dan kontrol, sehingga karakteristik khas koperasi kurang mendapat perhatian. Akibatnya, *cooperative governance* belum berkembang sebagai kerangka analisis yang mandiri. Sebaliknya, koperasi sering diposisikan sebagai objek penerapan prinsip *corporate governance*. Kondisi ini menyebabkan peran audit dalam koperasi dipahami secara teknokratis, bukan sebagai mekanisme demokrasi organisasi, sehingga literatur audit koperasi belum mampu menjelaskan kompleksitas fungsi audit dalam organisasi berbasis anggota.

Dominasi perspektif *corporate governance* dalam literatur audit koperasi memiliki implikasi teoretis dan konseptual yang signifikan. Secara teoretis, penggunaan kerangka *corporate governance* berpotensi mengaburkan identitas koperasi sebagai organisasi berbasis nilai kolektif. Secara konseptual, hal ini menyebabkan audit dipersempit menjadi instrumen kontrol manajerial, sementara fungsi akuntabilitas kolektif, legitimasi sosial, dan pemberdayaan anggota terpinggirkan. Mainar-Toledo et al. (2022) menunjukkan bahwa praktik tata kelola dalam organisasi keuangan dan koperasi sering dipengaruhi oleh model *governance* korporasi, meskipun konteks kelembagaannya berbeda. Temuan ini memperkuat indikasi bahwa literatur audit koperasi masih berada dalam bayang-bayang paradigma *corporate governance*. Dengan demikian, teori audit koperasi belum berkembang secara sistematis dalam kerangka *cooperative governance* yang utuh.

Selain itu, penelitian audit koperasi menunjukkan keterbatasan metodologis dan konseptual. Sebagian besar studi bersifat empiris parsial dan kontekstual, sehingga belum menghasilkan pemetaan konseptual yang komprehensif tentang posisi audit dalam tata kelola koperasi. Literatur yang ada tersebar dalam berbagai disiplin, seperti akuntansi, manajemen, dan studi koperasi, tanpa integrasi teoretis yang memadai. R. Novatiani et al. (2023) menunjukkan bahwa kajian tentang koperasi dan tata kelola sering dilakukan secara sektoral, tanpa sintesis konseptual yang menyeluruh. Akibatnya, belum terdapat pemetaan sistematis tentang peran audit dalam literatur tata kelola koperasi. Keterbatasan ini menghambat pengembangan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan hubungan antara audit, tata kelola, dan nilai-nilai koperasi.

Lebih jauh, literatur koperasi juga menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan tata kelola tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan institusional yang melingkupinya. Jamaluddin

R. A. et al. (2023) dan Buang A. A. (2021) menegaskan bahwa praktik tata kelola dalam koperasi sering dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan regulasi yang lebih luas. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa audit dalam koperasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kelembagaan yang mencerminkan relasi kekuasaan, akuntabilitas, dan legitimasi. Namun, dimensi kelembagaan audit koperasi belum terintegrasi secara sistematis dalam literatur *governance*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang audit koperasi masih bersifat fragmentaris dan belum terbangun dalam kerangka teoritis yang koheren.

Di sisi lain, kajian tentang koperasi dan organisasi ekonomi berbasis anggota juga menunjukkan bahwa praktik tata kelola sering kali mengadopsi model *governance* yang berasal dari konteks korporasi dan sektor keuangan modern. Hal ini terlihat dalam berbagai studi yang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan pengendalian dalam koperasi sering dirancang berdasarkan prinsip-prinsip *corporate governance* (Freire & Gonçalves, 2022; Mainar-Toledo et al., 2022). Akibatnya, koperasi cenderung dipahami melalui logika efisiensi dan kontrol, bukan melalui logika demokrasi ekonomi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang relevansi *corporate governance* dalam menjelaskan realitas tata kelola koperasi. Dengan kata lain, terdapat ketegangan konseptual antara nilai-nilai koperasi dan kerangka *governance* yang digunakan dalam penelitian audit koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa literatur audit koperasi masih didominasi oleh perspektif *corporate governance*, sementara kerangka *cooperative governance* belum berkembang secara memadai. Selain itu, belum terdapat kajian *Systematic Literature Review* yang secara sistematis memetakan posisi dan peran audit dalam tata kelola koperasi serta mengidentifikasi dominasi paradigma *corporate governance* dalam riset audit koperasi. Literatur yang ada bersifat terfragmentasi, sehingga belum menghasilkan pemetaan konseptual yang terintegrasi tentang audit dalam koperasi. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah konseptual, paradigmatik, dan metodologis dalam studi audit koperasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dan memetakan posisi serta peran audit dalam literatur tata kelola koperasi melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dominasi perspektif *corporate governance* dalam riset audit koperasi, mengklasifikasikan tipologi peran audit dalam kerangka *cooperative governance*, serta mengidentifikasi celah konseptual dan metodologis dalam literatur yang ada. Penelitian ini juga berupaya merumuskan arah pengembangan teori audit koperasi berbasis *cooperative governance*. Dengan pendekatan SLR, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap pola konseptual, dinamika paradigmatik, dan agenda riset masa depan dalam studi audit koperasi.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan kritik terhadap dominasi *corporate governance* dalam studi koperasi dan mengusulkan repositioning audit dalam kerangka *cooperative governance*. Secara konseptual, penelitian ini membangun kerangka pemahaman baru tentang audit koperasi yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas kolektif, legitimasi sosial, dan demokrasi organisasi. Secara metodologis, penelitian ini menyusun peta literatur audit koperasi berdasarkan klasifikasi paradigmatik, bukan sekadar klasifikasi tematik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas literatur audit koperasi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan paradigma *cooperative governance* dalam studi tata kelola organisasi ekonomi berbasis anggota.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mensintesis dan memetakan posisi serta peran audit dalam tata kelola koperasi, sekaligus mengidentifikasi dominasi perspektif *corporate governance* dan peluang pengembangan *cooperative governance*. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan integrasi temuan penelitian secara sistematis, transparan, dan replikatif. Selain itu, SLR digunakan tidak hanya untuk merangkum temuan empiris, tetapi juga untuk menganalisis dinamika konseptual dan paradigmatik dalam literatur audit koperasi. Proses seleksi literatur dilakukan dengan mengadopsi pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) untuk memastikan ketelitian metodologis dan keterlacakan proses penelitian.

Strategi Pencarian Literatur

Pencarian literatur dilakukan pada berbagai basis data ilmiah bereputasi serta kumpulan bibliografi yang relevan dengan topik audit dan tata kelola koperasi. Kata kunci disusun secara sistematis dengan kombinasi istilah: audit, internal audit, external audit, *corporate governance*, *cooperative governance*, *governance*, *cooperative*, dan *accountability*. Kata kunci dikombinasikan menggunakan operator Boolean (AND, OR) untuk memperluas cakupan pencarian. Pencarian literatur dibatasi pada artikel yang dipublikasikan dalam periode 2021-2025 guna menangkap perkembangan terbaru dalam studi audit koperasi.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Artikel yang diinklusi dalam penelitian ini memenuhi kriteria berikut:

1. Membahas audit dalam konteks koperasi.
2. Mengaitkan audit dengan tata kelola organisasi, baik *corporate governance* maupun *cooperative governance*.
3. Merupakan artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer-review.
4. Dipublikasikan pada periode 2021-2025.
5. Memiliki kualitas metodologis yang memadai dan relevansi konseptual yang jelas.

Artikel yang dieksklusi meliputi:

1. Penelitian yang membahas tata kelola korporasi tanpa konteks koperasi.
2. Artikel yang tidak membahas audit secara eksplisit.
3. Prosiding, laporan kebijakan, dan dokumen non-jurnal.
4. Artikel dengan kualitas metodologis rendah atau tanpa dimensi *governance*.

Proses Seleksi Literatur (PRISMA)

Proses seleksi literatur dilakukan mengikuti pedoman PRISMA melalui beberapa tahapan. Pada tahap identifikasi awal, diperoleh 478 artikel dari berbagai basis data ilmiah dan file bibliografi yang relevan dengan tema audit dan tata kelola koperasi. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan periode publikasi 2021–2025, jumlah artikel berkurang menjadi 386 artikel. Tahap *screening* dilakukan melalui penelaahan judul dan abstrak, sehingga tersisa 288 artikel yang relevan secara tematik. Selanjutnya, pada tahap *eligibility*, dilakukan telaah teks penuh terhadap 52 artikel, dan artikel yang tidak memenuhi kriteria konseptual dieliminasi. Pada tahap berikutnya, dilakukan evaluasi kualitas metodologis dan relevansi paradigmatis, sehingga tersisa 31 artikel. Hasil akhir proses seleksi adalah 20 artikel yang memenuhi seluruh kriteria konseptual, metodologis, dan paradigmatis, dan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini. Ringkasan proses seleksi literatur disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Proses Seleksi Literatur (PRISMA)

Tahapan PRISMA	Kegiatan	Jumlah Artikel	Kriteria/Alasan Seleksi
<i>Identification</i>	Identifikasi awal artikel dari basis data dan file bibliografi (.bibtex)	478	Artikel diperoleh dari kata kunci audit, <i>governance</i> , <i>cooperative</i> , dan <i>accountability</i>
<i>Identification</i> (filter tahun)	Penyaringan berdasarkan periode publikasi 2021–2025	386	Artikel di luar periode publikasi dieliminasi
<i>Screening</i>	Seleksi judul dan abstrak	288	Artikel yang tidak relevan dengan koperasi, audit, atau <i>governance</i> dieliminasi
<i>Eligibility</i>	Telaah <i>full-text</i>	52	Artikel tanpa fokus audit dalam konteks koperasi dieliminasi
<i>Quality & Paradigm Screening</i>	Evaluasi kualitas metodologis dan relevansi paradigmatis	31	Artikel dengan kualitas metodologi rendah atau tanpa dimensi <i>governance</i> dieliminasi
<i>Included</i>	Artikel yang dianalisis dalam SLR	20	Artikel yang memenuhi kriteria konseptual, metodologis, dan paradigmatis

Teknik Ekstraksi dan Analisis Data

Data dari setiap artikel yang terinklusi diekstraksi menggunakan lembar ekstraksi yang mencakup: karakteristik publikasi (penulis, tahun, jurnal), konteks koperasi, fokus audit, paradigma *governance*, metode penelitian, dan temuan utama. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: analisis tematik, analisis paradigmatis, dan sintesis konseptual. Analisis tematik digunakan untuk

mengidentifikasi pola isu dalam literatur audit koperasi. Analisis paradigmatik digunakan untuk mengklasifikasikan artikel berdasarkan logika *corporate governance*, *cooperative governance*, atau *hybrid governance*. Sintesis konseptual dilakukan untuk merumuskan tipologi peran audit dalam tata kelola koperasi serta mengidentifikasi celah konseptual dan metodologis dalam literatur.

Kerangka Coding Analisis

Untuk memastikan konsistensi analisis, penelitian ini menggunakan kerangka *coding* yang mencakup:

1. Paradigma *governance* (*corporate*, *cooperative*, *hybrid*).
2. Peran audit (kontrol, akuntabilitas, legitimasi, demokrasi organisasi).
3. Fokus penelitian (audit internal, audit eksternal, tata kelola).
4. Metode penelitian (kualitatif, kuantitatif, *mixed methods*).
5. Konteks koperasi (jenis dan sektor koperasi).
6. Kontribusi teoretis dan praktis.

Validitas dan Keandalan Kajian

Validitas dan keandalan penelitian dijaga melalui penerapan kriteria seleksi yang konsisten, dokumentasi proses seleksi literatur secara sistematis, serta penggunaan kerangka analisis yang eksplisit. Penggunaan pedoman PRISMA memastikan transparansi metodologis dan memungkinkan replikasi penelitian pada konteks atau periode yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian hasil penelitian ini menyajikan sintesis temuan dari 20 artikel yang terpilih melalui proses *Systematic Literature Review* (SLR). Penyajian hasil dilakukan secara terstruktur melalui lima tabel utama yang menggambarkan karakteristik studi, distribusi publikasi, lokasi penelitian, sektor koperasi, serta sintesis temuan dan implikasi teoretis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan literatur tata kelola koperasi dan posisi audit dalam kerangka *governance* koperasi. Dengan demikian, hasil SLR tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan kesenjangan penelitian. Penyajian tabel-tabel ini menjadi dasar untuk memahami pergeseran paradigma dari *corporate governance* menuju *cooperative governance* dalam konteks koperasi.

Secara konseptual, hasil SLR menunjukkan bahwa literatur tata kelola koperasi masih didominasi oleh kerangka *corporate governance*, sementara *cooperative governance* belum terformulasi secara sistematis. Audit dalam koperasi sebagian besar diposisikan sebagai mekanisme kontrol manajerial dan pelaporan keuangan, bukan sebagai instrumen demokrasi dan akuntabilitas anggota. Oleh karena itu, analisis terhadap temuan-temuan penelitian terdahulu menjadi penting untuk memetakan posisi audit dalam tata kelola koperasi. Bagian ini juga menjadi landasan untuk merumuskan *gap* penelitian dan *novelty* yang relevan dengan konteks koperasi. Dengan demikian, hasil SLR diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan konseptual bagi pengembangan studi tata kelola koperasi.

Tabel 1. Ringkasan Studi yang Direview dalam SLR Tata Kelola dan Audit Koperasi

No	Judul Penelitian	Penulis	Sektor – Lokasi – Populasi/Sampel	Tujuan Penelitian	Hasil dan Pembahasan
1.	<i>Cooperative governance and cooperative performance: A systematic literature review.</i>	(Jamaluddin R. A.; Rahman, A. A., 2023).	Multi-sektor koperasi – lintas negara – studi literatur.	Mensintesis hubungan tata kelola koperasi dan kinerja organisasi.	Literatur koperasi masih didominasi paradigma <i>corporate governance</i> . Audit diposisikan sebagai mekanisme kontrol manajerial, bukan sebagai instrumen demokrasi anggota.
2.	<i>Agricultural cooperatives and farm sustainability.</i>	(Candemir S.; Latruffe, L., 2021).	Koperasi pertanian – Eropa – koperasi agribisnis.	Menganalisis peran <i>governance</i> terhadap	<i>Governance</i> meningkatkan efisiensi operasional dan

No	Judul Penelitian	Penulis	Sektor – Lokasi – Populasi/Sampel	Tujuan Penelitian	Hasil dan Pembahasan
				keberlanjutan koperasi.	keberlanjutan usaha. Audit dipahami sebagai alat pelaporan keuangan.
3.	<i>Success factors of citizen energy cooperatives.</i>	(Ahlemeyer T.; Hisschemöller, M., 2022).	Koperasi energi – Jerman – koperasi energi.	Mengidentifikasi faktor keberhasilan koperasi energi.	Partisipasi anggota dan transparansi menjadi faktor utama <i>governance</i> . Audit berfungsi sebagai mekanisme legitimasi organisasi.
4.	<i>Scaling renewable energy cooperatives.</i>	(Boucher M., 2024).	Koperasi energi – Prancis – koperasi energi.	Menganalisis <i>governance</i> dalam scaling koperasi energi.	<i>Governance</i> koperasi cenderung mengikuti model <i>corporate governance</i> untuk memenuhi tuntutan regulator.
5.	<i>Cooperative organizations and socio-economic development.</i>	(Ribas et al., 2022).	Multi-sektor koperasi – Brasil – koperasi.	Menganalisis kontribusi koperasi terhadap pembangunan sosial ekonomi.	<i>Governance</i> koperasi meningkatkan dampak sosial, tetapi audit masih bersifat administratif.
6.	<i>HRM and financial performance in cooperative enterprises.</i>	(Chali & Lakatos, 2024).	Koperasi bisnis – lintas negara – koperasi.	Menganalisis pengaruh SDM terhadap kinerja koperasi.	<i>Governance</i> berperan sebagai mediator kinerja koperasi. Audit muncul secara implisit melalui kontrol internal.
7.	<i>Cooperative governance and organizational sustainability.</i>	(Freire & Gonçalves, 2022).	Multi-sektor koperasi – Portugal – koperasi.	Menganalisis hubungan <i>governance</i> dan sustainability.	<i>Governance</i> koperasi meningkatkan legitimasi organisasi. Audit dipahami sebagai mekanisme kontrol formal.
8.	<i>Governance structures in cooperative enterprises.</i>	(Mainar-Toledo et al., 2022).	Koperasi – Spanyol – koperasi.	Menganalisis struktur <i>governance</i> koperasi.	<i>Governance</i> koperasi bersifat <i>hybrid</i> (demokratis dan korporasi).
9.	<i>Articulating value in cooperative housing.</i>	(Crabtree E.; Brennan, C., 2025).	Koperasi perumahan – Amerika Serikat – koperasi.	Menganalisis nilai sosial koperasi perumahan.	<i>Governance</i> koperasi menciptakan nilai sosial. Audit berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas organisasi.
10.	<i>Cooperative enterprises and sustainable development.</i>	(Nakayiso J., 2023).	Koperasi – Uganda – koperasi.	Menganalisis kontribusi koperasi terhadap SDGs.	<i>Governance</i> koperasi mendukung pembangunan berkelanjutan. Audit bersifat administratif.
11.	<i>Member participation in cooperatives.</i>	(Buang A. A., 2021).	Koperasi – Malaysia – koperasi.	Menganalisis peran partisipasi anggota.	Partisipasi anggota masih lemah dalam <i>governance</i> koperasi.
12.	<i>Cooperative governance in emerging economies.</i>	(Otwoko J., 2021).	Koperasi – Kenya – koperasi.	Menganalisis <i>governance</i> koperasi.	<i>Corporate governance</i> masih dominan dalam koperasi negara berkembang.
13.	Penguatan tata kelola koperasi berbasis pendampingan.	(Mukhlisin et al., 2023).	Koperasi – Indonesia – koperasi.	Menganalisis penguatan <i>governance</i> koperasi.	Pendampingan meningkatkan akuntabilitas dan fungsi audit internal koperasi.
14.	Analisis efektivitas pengendalian internal dalam menerapkan	(Dukuhsari, 2025).	Koperasi wanita – Indonesia – koperasi.	Menganalisis pengendalian internal koperasi.	Sistem pengendalian internal lemah pada monitoring dan <i>risk assessment</i> .

No	Judul Penelitian	Penulis	Sektor – Lokasi – Populasi/Sampel	Tujuan Penelitian	Hasil dan Pembahasan
15.	pemberian pinjaman pada koperasi wanita. Pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja koperasi.	(Sutrisno & Wibowo, 2022).	Koperasi wanita – Indonesia – koperasi.	Menganalisis peran audit internal.	Audit internal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi.
16.	Peningkatan Kapasitas Audit Internal Berbasis Sia Di Kopwan Bina Citra Wanita Bringkang Gresik Pendahuluan Koperasi Wanita (Kopwan).	(Lastianti et al., 2025).	Koperasi – Indonesia – koperasi.	Menganalisis fungsi pengawasan koperasi.	Pengawasan masih bersifat formal dan administratif.
17.	Integrasi Audit Trail dan Pengendalian Internal Terhadap Loyalitas Anggota Koperasi.	(April et al., 2025).	Koperasi – Indonesia – koperasi.	Menganalisis audit trail terhadap kepercayaan anggota.	Audit meningkatkan <i>trust</i> dan loyalitas anggota koperasi.
18.	Pengaruh tata kelola koperasi terhadap kinerja keuangan.	(R. A. Novatiani et al., 2023).	Koperasi simpan pinjam – Indonesia – 68 koperasi.	Menganalisis pengaruh <i>governance</i> terhadap kinerja keuangan.	Prinsip GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja koperasi.
19.	Akuntabilitas koperasi.	(Novianti, 2022).	Koperasi – Indonesia – koperasi.	Menganalisis mekanisme akuntabilitas koperasi.	Akuntabilitas koperasi masih bersifat formal.
20.	Implementasi Audit Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Keberlangsungan Usaha UMKM Pabrik Citra.	(Amalina et al., 2025).	Koperasi – Indonesia – koperasi.	Menganalisis kontrol internal koperasi.	Kontrol internal menjadi bagian dari mekanisme audit koperasi.

Tabel 1 menyajikan ringkasan komprehensif dari 20 artikel yang dianalisis dalam penelitian ini, mencakup judul penelitian, penulis, sektor, lokasi, tujuan, serta hasil dan pembahasan utama. Tabel ini menunjukkan keragaman konteks penelitian koperasi, baik dari sisi sektor operasional maupun lokasi geografis. Selain itu, tabel ini memperlihatkan bahwa studi koperasi tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial, kelembagaan, dan tata kelola organisasi. Hasil-hasil penelitian yang dirangkum menunjukkan bahwa tata kelola koperasi memiliki hubungan erat dengan kinerja organisasi, keberlanjutan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, Tabel 1 memberikan gambaran awal mengenai kompleksitas peran *governance* dan audit dalam koperasi.

Secara analitis, Tabel 1 juga menunjukkan adanya pola dominasi pendekatan *corporate governance* dalam menjelaskan tata kelola koperasi. Sebagian besar penelitian menggunakan konsep-konsep yang berasal dari literatur korporasi, seperti struktur dewan, mekanisme pengawasan, dan kontrol internal. Audit dalam koperasi umumnya dipahami sebagai mekanisme kontrol formal, bukan sebagai bagian dari praktik demokrasi organisasi. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara karakteristik koperasi yang berbasis keanggotaan dengan kerangka *governance* yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, Tabel 1 menjadi dasar untuk memahami perlunya pengembangan kerangka *cooperative governance* yang lebih kontekstual.

Tabel 2. Distribusi Studi Berdasarkan Tahun Publikasi (2021–2025)

Tahun Publikasi	Jumlah Studi	Penulis
2021	3	(Buang A. A., 2021; Candemir S.; Latruffe, L., 2021)
2022	6	(Ahlemeyer T.; Hisschemöller, M., 2022; Freire & Gonçalves, 2022; Mainar-Toledo et al., 2022; Novianti, 2022; Ribas et al., 2022; Sutrisno & Wibowo, 2022)
2023	4	(Jamaluddin R. A.; Rahman, A. A., 2023; Mukhlisin et al., 2023; Nakayiso J., 2023; R. Novatiani et al., 2023)
2024	3	(Boucher M., 2024; Chali & Lakatos, 2024)

Tahun Publikasi	Jumlah Studi	Penulis
2025	2	(Amalina et al., 2025; April et al., 2025; Crabtree E.; Brennan, C., 2025; Dukuhsari, 2025; Lastianti et al., 2025)
Total	20	–

Tabel 2 menunjukkan distribusi artikel berdasarkan tahun publikasi dalam rentang waktu 2021–2025. Distribusi ini memperlihatkan bahwa penelitian mengenai tata kelola koperasi dan audit mengalami peningkatan signifikan pada periode tertentu, khususnya setelah tahun 2021. Peningkatan jumlah publikasi menunjukkan bahwa isu *governance* koperasi semakin mendapat perhatian dalam literatur akademik. Selain itu, variasi jumlah publikasi antar-tahun mencerminkan dinamika perkembangan topik penelitian koperasi. Dengan demikian, Tabel 2 memberikan gambaran temporal mengenai evolusi kajian tata kelola koperasi.

Secara interpretatif, distribusi publikasi yang meningkat menunjukkan bahwa tata kelola koperasi semakin dipandang sebagai isu strategis dalam pengembangan organisasi koperasi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa penelitian koperasi tidak lagi terbatas pada aspek operasional, tetapi telah berkembang ke isu-isu *governance* dan audit. Meskipun demikian, peningkatan jumlah publikasi tidak selalu diikuti oleh perkembangan konseptual yang signifikan. Banyak penelitian masih menggunakan kerangka *corporate governance* tanpa adaptasi terhadap karakteristik koperasi. Oleh karena itu, Tabel 2 memperkuat argumentasi bahwa terdapat kebutuhan untuk pengembangan konsep *cooperative governance* yang lebih matang.

Tabel 3. Distribusi Studi Berdasarkan Negara/Lokasi Penelitian

Negara/Lokasi	Jumlah Studi	Penulis
Indonesia	8	(Amalina et al., 2025; April et al., 2025; Dukuhsari, 2025; Lastianti et al., 2025; Mukhlisin et al., 2023; R. Novatiani et al., 2023; Novianti, 2022; Sutrisno & Wibowo, 2022)
Jerman	1	(Ahlemeyer T.; Hisschemöller, M., 2022)
Spanyol	1	(Mainar-Toledo et al., 2022)
Portugal	1	(Freire & Gonçalves, 2022)
Prancis	1	(Boucher M., 2024)
Malaysia	1	(Buang A. A., 2021)
Kenya	1	(Otwoko & Maina, 2021)
Uganda	1	(Nakayiso J., 2023)
Amerika Serikat	1	(Crabtree E.; Brennan, C., 2025)
Brasil	1	(Ribas et al., 2022)
Lintas negara (<i>multi-country studies</i>)	3	(Candemir S.; Latruffe, L., 2021; Chali & Lakatos, 2024; Jamaluddin R. A.; Rahman, A. A., 2023)
Total	20	–

Tabel 3 menggambarkan distribusi studi berdasarkan lokasi atau negara penelitian. Hasil distribusi menunjukkan bahwa penelitian koperasi tersebar di berbagai negara, dengan dominasi studi di Indonesia dan beberapa negara Eropa serta Afrika. Distribusi geografis ini menunjukkan bahwa isu tata kelola koperasi bersifat global, meskipun konteks sosial dan kelembagaan setiap negara berbeda. Selain itu, tabel ini memperlihatkan bahwa penelitian koperasi tidak hanya berkembang di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Dengan demikian, Tabel 3 memberikan perspektif geografis terhadap perkembangan literatur tata kelola koperasi.

Secara konseptual, distribusi lokasi penelitian menunjukkan adanya perbedaan fokus kajian antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, penelitian koperasi cenderung berfokus pada sektor energi, perumahan, dan keberlanjutan, sedangkan di negara berkembang lebih banyak menekankan aspek tata kelola dan akuntabilitas keuangan. Perbedaan fokus ini menunjukkan bahwa konteks kelembagaan memengaruhi cara *governance* dan audit dikonseptualisasikan. Selain itu, dominasi studi di negara berkembang menunjukkan bahwa koperasi masih dipandang sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, Tabel 3 memperkuat

argumen bahwa konsep *cooperative governance* perlu dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Tabel 4. Distribusi Studi Berdasarkan Sektor/Jenis Operasional Koperasi

Sektor Koperasi	Jumlah Studi	Penulis
Multi-sektor koperasi	6	(Buang A. A., 2021; Freire & Gonçalves, 2022; Jamaluddin R. A.; Rahman, A. A., 2023; Mainar-Toledo et al., 2022; Nakayiso J., 2023; Ribas et al., 2022)
Koperasi keuangan/simpan pinjam	5	(Amalina et al., 2025; Mukhlisin et al., 2023; R. Novatiani et al., 2023; R. A. Novatiani et al., 2023; Sutrisno & Wibowo, 2022)
Koperasi energi	3	(Ahlemeyer T.; Hisschemöller, M., 2022; April et al., 2025; Boucher M., 2024)
Koperasi pertanian	2	(Candemir S.; Latruffe, L., 2021; Otwoko J., 2021)
Koperasi perumahan	1	(Crabtree E.; Brennan, C., 2025)
Koperasi wanita	2	(Dukuhsari, 2025; Lastianti et al., 2025)
Koperasi bisnis	1	(Chali & Lakatos, 2024)
Total	20	—

Tabel 4 menyajikan distribusi studi berdasarkan sektor atau jenis operasional koperasi yang diteliti. Distribusi sektor menunjukkan bahwa penelitian tata kelola koperasi banyak dilakukan pada koperasi multi-sektor dan koperasi keuangan, diikuti oleh sektor energi, pertanian, perumahan, dan koperasi wanita. Keragaman sektor ini menunjukkan bahwa tata kelola koperasi menjadi isu penting di berbagai jenis organisasi koperasi. Selain itu, tabel ini memperlihatkan bahwa sektor dengan kompleksitas operasional tinggi cenderung lebih banyak diteliti dalam konteks *governance* dan audit. Dengan demikian, Tabel 4 memberikan gambaran mengenai konteks sektoral penelitian koperasi.

Secara analitis, dominasi sektor koperasi keuangan dan multi-sektor menunjukkan bahwa isu audit menjadi lebih relevan pada koperasi dengan risiko keuangan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa audit dalam koperasi sering dikaitkan dengan kebutuhan pengendalian risiko dan akuntabilitas keuangan. Namun, penelitian pada sektor lain menunjukkan bahwa audit juga memiliki dimensi sosial dan kelembagaan. Dengan demikian, audit dalam koperasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Oleh karena itu, Tabel 4 mendukung argumentasi bahwa peran audit dalam koperasi perlu dipahami secara multidimensional dalam kerangka *cooperative governance*.

Tabel 5. Sintesis Temuan Studi dan Implikasi bagi Tujuan Penelitian

No	Penulis	Temuan Utama	Implikasi bagi Tujuan Penelitian
1.	Jamaluddin R. A. et al. (2023)	Studi ini menunjukkan bahwa mayoritas penelitian koperasi masih menggunakan kerangka <i>corporate governance</i> dalam menjelaskan mekanisme tata kelola koperasi. Audit diposisikan sebagai instrumen kontrol manajerial dan kepatuhan organisasi, bukan sebagai mekanisme partisipasi anggota. Selain itu, ditemukan bahwa <i>governance</i> koperasi sering kali dipahami sebagai adaptasi dari praktik korporasi.	Temuan ini menguatkan argumen bahwa terdapat dominasi paradigma <i>corporate governance</i> dalam literatur koperasi. Hal ini menjadi dasar bagi penelitian ini untuk memetakan posisi audit dalam transisi menuju <i>cooperative governance</i> dan mengembangkan kerangka konseptual yang lebih sesuai dengan karakteristik koperasi.
2.	Candemir et al., (2021).	<i>Governance</i> koperasi pertanian terbukti berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional dan keberlanjutan usaha. Namun, audit lebih dipahami sebagai mekanisme pelaporan keuangan dan kepatuhan administratif daripada sebagai bagian dari tata kelola demokratis.	Temuan ini menunjukkan bahwa peran audit dalam koperasi masih bersifat teknokratis dan administratif. Penelitian ini perlu mengkaji bagaimana audit dapat direkonseptualisasi sebagai mekanisme <i>governance</i> yang mendukung keberlanjutan koperasi berbasis partisipasi anggota.
3.	Ahlemeyer et al. (2022).	Studi ini menemukan bahwa partisipasi anggota, transparansi informasi, dan mekanisme pengawasan internal merupakan faktor utama keberhasilan koperasi energi. Audit internal berfungsi sebagai sarana legitimasi organisasi terhadap anggota dan pemangku kepentingan.	Temuan ini menunjukkan bahwa audit memiliki potensi sebagai instrumen legitimasi dan partisipasi dalam koperasi. Penelitian ini dapat mengembangkan argumen bahwa audit tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi

No	Penulis	Temuan Utama	Implikasi bagi Tujuan Penelitian
4.	(Boucher M., 2024).	<i>Governance</i> koperasi energi cenderung mengikuti model <i>corporate governance</i> untuk memenuhi tuntutan regulator dan investor. Mekanisme audit digunakan untuk memastikan akuntabilitas eksternal, bukan untuk memperkuat partisipasi anggota.	juga sebagai mekanisme demokrasi dalam <i>cooperative governance</i> . Temuan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara logika korporasi dan prinsip koperasi. Penelitian ini dapat memanfaatkan temuan tersebut untuk menjelaskan bagaimana audit menjadi titik temu sekaligus sumber konflik antara <i>corporate governance</i> dan <i>cooperative governance</i> .
5.	(Ribas et al., 2022).	<i>Governance</i> koperasi berperan dalam meningkatkan dampak sosial organisasi, tetapi audit lebih diposisikan sebagai alat kontrol administratif daripada sebagai mekanisme akuntabilitas sosial kepada anggota.	Temuan ini mengindikasikan bahwa audit dalam koperasi belum sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas sosial. Penelitian ini perlu mengkaji bagaimana audit dapat diperluas dari kontrol administratif menjadi mekanisme akuntabilitas sosial dalam <i>cooperative governance</i> .
6.	(Chali & Lakatos, 2024).	<i>Governance</i> organisasi berfungsi sebagai mediator antara manajemen sumber daya manusia dan kinerja koperasi. Audit tidak dibahas secara eksplisit, tetapi kontrol internal muncul sebagai elemen penting dalam <i>governance</i> koperasi.	Temuan ini menunjukkan bahwa audit sering hadir secara implisit dalam literatur koperasi melalui konsep kontrol internal. Penelitian ini dapat mengintegrasikan konsep audit dan kontrol internal dalam kerangka <i>cooperative governance</i> .
7.	(Freire & Gonçalves, 2022).	<i>Governance</i> koperasi meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan organisasi. Namun, kerangka <i>governance</i> yang digunakan masih mengadopsi pendekatan <i>corporate governance</i> , sehingga audit dipahami sebagai mekanisme kontrol formal.	Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa <i>cooperative governance</i> belum memiliki kerangka konseptual yang mandiri. Penelitian ini dapat mengisi celah tersebut dengan memetakan peran audit dalam kerangka <i>cooperative governance</i> yang khas.
8.	(Mainar-Toledo et al., 2022).	Struktur <i>governance</i> koperasi bersifat hybrid, yaitu menggabungkan prinsip demokrasi anggota dengan mekanisme kontrol korporasi. Audit diposisikan sebagai mekanisme kontrol formal untuk menjaga stabilitas organisasi.	Temuan ini relevan untuk menjelaskan bahwa koperasi berada dalam posisi transisi antara <i>corporate</i> dan <i>cooperative governance</i> . Penelitian ini dapat menggunakan temuan tersebut untuk menjelaskan posisi audit sebagai elemen hybrid dalam tata kelola koperasi.
9.	Crabtree et al. (2025).	<i>Governance</i> koperasi perumahan memungkinkan terciptanya nilai sosial dan ekonomi. Audit dipahami sebagai mekanisme akuntabilitas organisasi terhadap anggota dan pemangku kepentingan.	Temuan ini menunjukkan bahwa audit dalam koperasi dapat berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas sosial. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman audit sebagai instrumen pembentukan nilai sosial dalam <i>cooperative governance</i> .
10.	(Nakayiso J., 2023).	<i>Governance</i> koperasi mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun, audit masih diposisikan sebagai mekanisme kontrol administratif.	Temuan ini menunjukkan bahwa audit belum diintegrasikan secara strategis dalam <i>governance</i> koperasi. Penelitian ini dapat menempatkan audit sebagai mekanisme strategis dalam <i>cooperative governance</i> yang mendukung keberlanjutan koperasi.
11.	Buang A. A. (2021).	Partisipasi anggota dalam koperasi masih relatif lemah, sehingga <i>governance</i> koperasi cenderung bersifat <i>top-down</i> . Audit tidak diposisikan sebagai mekanisme partisipasi anggota.	Temuan ini mengindikasikan bahwa audit belum dimanfaatkan sebagai instrumen demokrasi anggota. Penelitian ini dapat mengembangkan konsep audit sebagai mekanisme partisipatif dalam <i>cooperative governance</i> .
12.	(Otwoko & Maina, 2021).	<i>Corporate governance</i> masih menjadi kerangka dominan dalam tata kelola koperasi di negara berkembang. Audit dipahami sebagai mekanisme kontrol manajerial.	Temuan ini memperkuat argumen bahwa literatur koperasi di negara berkembang masih sangat dipengaruhi paradigma korporasi. Penelitian ini dapat mengkaji peluang pengembangan <i>cooperative governance</i> yang lebih kontekstual.
13.	(Mukhlisin et al., 2023).	Pendampingan kelembagaan meningkatkan kapasitas manajemen dan pengawasan internal koperasi. Audit internal berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas organisasi.	Temuan ini menunjukkan bahwa audit internal memiliki peran strategis dalam penguatan tata kelola koperasi. Penelitian ini dapat mengembangkan kerangka audit sebagai mekanisme institusional dalam <i>cooperative governance</i> .

No	Penulis	Temuan Utama	Implikasi bagi Tujuan Penelitian
14.	(Dukuhsari, 2025).	Sistem pengendalian internal koperasi masih lemah pada aspek monitoring dan manajemen risiko. Audit internal berfungsi sebagai mekanisme kontrol operasional.	Temuan ini menunjukkan bahwa audit masih difokuskan pada aspek teknis operasional. Penelitian ini dapat memperluas peran audit dari kontrol operasional menjadi mekanisme <i>governance</i> koperasi.
15.	(Lastianti et al., 2025).	Audit internal meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan koperasi. Namun, audit belum terintegrasi dalam kerangka <i>governance</i> koperasi secara menyeluruh.	Temuan ini mengindikasikan bahwa audit memiliki potensi untuk memperkuat <i>cooperative governance</i> , tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini dapat merumuskan model integrasi audit dalam tata kelola koperasi.
16.	(Mukhlisin et al., 2023).	Fungsi pengawasan koperasi masih bersifat formal dan administratif. Audit internal dan eksternal belum terintegrasi secara sistematis.	Temuan ini menunjukkan adanya fragmentasi fungsi audit dalam koperasi. Penelitian ini dapat mengembangkan model tata kelola koperasi yang mengintegrasikan audit internal dan eksternal dalam <i>cooperative governance</i> .
17.	(April et al., 2025).	Audit trail meningkatkan transparansi dan kepercayaan anggota koperasi. Audit berkontribusi pada peningkatan loyalitas anggota.	Temuan ini menunjukkan bahwa audit memiliki dimensi sosial dalam koperasi. Penelitian ini dapat mengembangkan konsep audit sebagai mekanisme pembentukan kepercayaan dalam <i>cooperative governance</i> .
18.	R. Novatiani et al. (2023).	Prinsip <i>Good Corporate governance</i> (GCG) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi. Audit diposisikan sebagai indikator kualitas pelaporan keuangan.	Temuan ini menunjukkan dominasi paradigma <i>corporate governance</i> dalam koperasi. Penelitian ini dapat mengkritisi penggunaan GCG dalam koperasi dan mengembangkan konsep <i>cooperative governance</i> yang lebih sesuai.
19.	(Novianti, 2022).	Akuntabilitas koperasi masih bersifat formal dan administratif, belum sepenuhnya berbasis partisipasi anggota. Audit dipahami sebagai mekanisme pelaporan.	Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas koperasi belum terintegrasi dengan prinsip demokrasi anggota. Penelitian ini dapat mengembangkan konsep audit sebagai mekanisme akuntabilitas partisipatif dalam <i>cooperative governance</i> .
20.	(Amalina et al., 2025).	Pengendalian internal berfungsi sebagai instrumen kontrol organisasi. Audit menjadi bagian dari sistem pengendalian internal, tetapi belum terintegrasi dalam kerangka <i>governance</i> koperasi yang komprehensif.	Temuan ini menunjukkan bahwa audit masih dipahami secara sempit sebagai bagian dari kontrol internal. Penelitian ini dapat mengembangkan kerangka audit yang lebih luas dalam <i>cooperative governance</i> , yang mencakup aspek kontrol, akuntabilitas, dan partisipasi anggota.

Tabel 5 menyajikan sintesis temuan utama dari seluruh artikel yang dianalisis serta implikasinya bagi tujuan penelitian. Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian koperasi masih menggunakan kerangka *corporate governance* dalam menjelaskan mekanisme tata kelola koperasi. Audit dalam koperasi umumnya diposisikan sebagai mekanisme kontrol manajerial dan pelaporan keuangan. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggota dan akuntabilitas sosial belum terintegrasi secara optimal dalam praktik *governance* koperasi. Dengan demikian, Tabel 5 memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi audit dalam literature tata kelola koperasi.

Secara teoretis, sintesis temuan dalam Tabel 5 menunjukkan adanya kesenjangan antara karakteristik koperasi yang berbasis keanggotaan dengan kerangka *governance* yang digunakan dalam penelitian. Dominasi *corporate governance* dalam literatur koperasi menunjukkan bahwa konsep *cooperative governance* belum berkembang secara sistematis. Audit dalam koperasi belum dipahami sebagai instrumen demokrasi organisasi, tetapi lebih sebagai mekanisme kontrol formal. Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat peluang konseptual untuk mengembangkan kerangka *cooperative governance* yang menempatkan audit sebagai mekanisme institusional dan partisipatif. Oleh karena itu, Tabel 5 menjadi dasar utama bagi penelitian ini untuk merumuskan kontribusi teoretis dalam studi tata kelola koperasi.

Pembahasan

Posisi Audit dalam Literatur Tata Kelola Koperasi

Hasil SLR menunjukkan bahwa audit dalam literatur tata kelola koperasi umumnya diposisikan sebagai mekanisme pengendalian internal dan eksternal yang berorientasi pada kepatuhan organisasi. Jamaluddin R. A. et al. (2023) menjelaskan bahwa sebagian besar penelitian koperasi masih menempatkan audit sebagai instrumen kontrol yang diadopsi dari kerangka *corporate governance*, sehingga audit lebih dipahami sebagai fungsi teknis daripada fungsi kelembagaan. Dalam studi mereka, audit dipandang sebagai bagian dari mekanisme monitoring untuk memastikan kinerja koperasi sesuai dengan standar manajerial dan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa audit dalam koperasi belum dipahami sebagai elemen strategis dalam tata kelola organisasi. Selain itu, audit jarang dikaitkan dengan prinsip demokrasi anggota yang menjadi karakteristik utama koperasi. Oleh karena itu, posisi audit dalam literatur koperasi masih bersifat teknokratis dan administratif.

Selain itu, literatur koperasi menunjukkan bahwa audit sering dipisahkan secara konseptual dari *governance*. Mainar-Toledo et al. (2022) mengemukakan bahwa struktur tata kelola koperasi banyak dianalisis melalui pendekatan *hybrid governance*, yaitu kombinasi antara prinsip demokrasi anggota dan mekanisme kontrol korporasi. Dalam kerangka tersebut, audit diposisikan sebagai mekanisme kontrol formal yang mendukung stabilitas organisasi, bukan sebagai bagian dari proses demokrasi koperasi. Freire & Gonçalves (2022) juga menegaskan bahwa audit dalam koperasi sering dipahami sebagai mekanisme kontrol formal yang bertujuan menjaga legitimasi organisasi. Pemisahan antara audit dan *governance* menyebabkan hubungan keduanya tidak dikaji secara mendalam dalam literatur koperasi. Akibatnya, audit lebih dipahami sebagai alat kontrol manajerial daripada sebagai mekanisme institusional dalam tata kelola koperasi. Temuan ini menunjukkan bahwa posisi audit dalam literatur koperasi masih berada di pinggir konsep *governance*.

Namun, beberapa penelitian mulai menunjukkan perluasan makna audit dalam koperasi. Ribas et al. (2022) menjelaskan bahwa *governance* koperasi tidak hanya berkaitan dengan struktur manajerial, tetapi juga dengan kemampuan organisasi dalam membangun akuntabilitas sosial terhadap anggota dan komunitas. Dalam konteks tersebut, audit mulai dipahami sebagai mekanisme yang membangun kepercayaan antara pengurus dan anggota koperasi. Candemir et al., (2021) juga menunjukkan bahwa dalam koperasi pertanian, audit berperan dalam meningkatkan transparansi dan keberlanjutan organisasi. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa audit memiliki dimensi sosial yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur koperasi. Dengan demikian, audit dapat dipahami sebagai jembatan antara aspek teknis pengelolaan organisasi dan aspek sosial kelembagaan koperasi. Perspektif ini memperluas pemahaman audit dari fungsi teknis menjadi fungsi institusional.

Berdasarkan sintesis temuan tersebut, penelitian ini menawarkan *novelty* berupa reposisi konseptual audit dalam koperasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan audit sebagai mekanisme kontrol manajerial, penelitian ini memandang audit sebagai elemen inti dalam tata kelola koperasi. R. Novatiani et al., (2023) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja koperasi, tetapi kerangka yang digunakan masih bersifat korporasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa audit dalam koperasi masih dipahami melalui logika *corporate governance*. Penelitian ini melampaui pendekatan tersebut dengan menempatkan audit sebagai mekanisme institusional yang menghubungkan pengurus, anggota, dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, audit diposisikan sebagai bagian dari struktur *cooperative governance*, bukan sekadar fungsi administratif. *Novelty* ini memperluas kerangka konseptual audit dalam koperasi dari perspektif teknis menuju perspektif kelembagaan.

Lebih lanjut, penelitian ini mengembangkan pemahaman baru bahwa audit dalam koperasi memiliki tiga fungsi utama, yaitu kontrol organisasi, akuntabilitas anggota, dan legitimasi sosial. Buang A. A. (2021) menjelaskan bahwa partisipasi anggota dalam koperasi masih relatif lemah, sehingga *governance* koperasi cenderung bersifat *top-down*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa audit belum dimanfaatkan sebagai instrumen partisipasi anggota. Mukhlisin et al. (2023) menunjukkan bahwa audit internal berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas koperasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan fungsi kontrol, akuntabilitas, dan partisipasi dalam satu kerangka audit koperasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas definisi audit dalam koperasi sebagai mekanisme demokrasi organisasi. *Novelty* ini memperkaya literatur tata kelola koperasi dengan menawarkan perspektif audit yang lebih sesuai dengan karakteristik *cooperative governance*.

Dominasi Perspektif *Corporate governance* Dalam Studi Koperasi

Hasil SLR menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian koperasi masih menggunakan kerangka *corporate governance* dalam menjelaskan tata kelola koperasi. Otwoko & Maina (2021) menjelaskan bahwa tata kelola koperasi di negara berkembang banyak mengadopsi prinsip-prinsip *corporate governance*, terutama dalam aspek struktur organisasi dan mekanisme pengawasan. Dalam studi mereka, *governance* koperasi dipahami melalui pendekatan yang menekankan kontrol manajerial dan efisiensi organisasi. Jamaluddin R. A. et al. (2023) juga menunjukkan bahwa literatur koperasi secara global cenderung menggunakan konsep *corporate governance* sebagai referensi utama dalam menganalisis kinerja koperasi. Temuan ini menunjukkan bahwa koperasi sering dipahami melalui logika organisasi korporasi, meskipun koperasi memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda. Dengan demikian, dominasi *corporate governance* dalam studi koperasi menjadi pola yang konsisten dalam literatur akademik.

Dominasi *corporate governance* juga tercermin dalam penggunaan prinsip-prinsip tata kelola yang diadopsi secara langsung dari literatur korporasi. R. Novatiani et al. (2023) menunjukkan bahwa prinsip *Good Corporate governance* seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibility, dan fairness digunakan untuk mengukur kinerja koperasi. Dalam studi tersebut, *governance* koperasi dianalisis menggunakan indikator yang sama dengan organisasi korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dipahami melalui kerangka evaluasi yang bersifat korporatif. Candemir et al. (2021) juga menemukan bahwa *governance* koperasi pertanian dianalisis menggunakan pendekatan yang menekankan efisiensi, kepatuhan, dan kontrol organisasi. Dengan demikian, dominasi *corporate governance* tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga metodologis dalam studi koperasi. Temuan ini menunjukkan bahwa literatur koperasi belum sepenuhnya mengembangkan kerangka *governance* yang khas bagi koperasi.

Selain itu, dominasi *corporate governance* juga terlihat dalam cara audit diposisikan dalam koperasi. Dalam kerangka *corporate governance*, audit dipahami sebagai mekanisme kontrol untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik organisasi. Mainar-Toledo et al., (2022) menjelaskan bahwa struktur *governance* koperasi bersifat *hybrid*, yaitu menggabungkan prinsip demokrasi anggota dengan mekanisme kontrol korporasi. Dalam kerangka *hybrid* tersebut, audit lebih banyak diposisikan sebagai mekanisme kontrol formal yang mendukung stabilitas organisasi. Freire & Gonçalves (2022) juga menegaskan bahwa audit dalam koperasi sering dipahami sebagai mekanisme kontrol formal yang bertujuan menjaga legitimasi organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa audit dalam koperasi masih dipahami melalui logika *corporate governance*, bukan melalui logika demokrasi koperasi. Dengan demikian, dominasi *corporate governance* membentuk cara audit dipahami dalam literatur koperasi.

Berdasarkan sintesis temuan tersebut, penelitian ini menawarkan *novelty* dengan mengkritisi dominasi *corporate governance* dalam studi koperasi secara sistematis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menerima kerangka *corporate governance* sebagai *given*, penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi kerangka tersebut bersifat problematis secara konseptual. Ribas et al. (2022) menjelaskan bahwa koperasi memiliki peran sosial yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui kerangka *corporate governance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak mampu menangkap dimensi sosial dan partisipatif koperasi secara utuh. Penelitian ini mengusulkan bahwa tata kelola koperasi perlu dipahami melalui kerangka *cooperative governance* yang menekankan demokrasi anggota dan akuntabilitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi dominasi *corporate governance*, tetapi juga menawarkan alternatif konseptual yang lebih sesuai dengan karakteristik koperasi. *Novelty* ini memberikan kontribusi teoretis dalam menggeser paradigma *governance* koperasi dari korporasi ke koperasi.

Lebih lanjut, penelitian ini mengembangkan argumentasi bahwa audit merupakan titik kritis dalam transisi dari *corporate governance* ke *cooperative governance*. Jamaluddin R. A. et al. (2023) menunjukkan bahwa audit dalam koperasi masih diposisikan sebagai mekanisme kontrol manajerial yang diadopsi dari kerangka *corporate governance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa audit menjadi elemen yang paling jelas mencerminkan dominasi paradigma korporasi dalam koperasi. Penelitian ini melampaui temuan tersebut dengan menempatkan audit sebagai mekanisme demokrasi organisasi dalam kerangka *cooperative governance*. Dengan demikian, audit tidak hanya dipahami sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme partisipasi anggota dan legitimasi organisasi. *Novelty* ini memperluas diskursus akademik mengenai tata kelola koperasi dengan memposisikan audit

sebagai jembatan konseptual antara *corporate governance* dan *cooperative governance*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika tata kelola koperasi secara lebih kontekstual.

Celah Konseptual Dalam Pengembangan *Cooperative Governance* Dan Peran Audit

Hasil SLR menunjukkan bahwa *cooperative governance* belum memiliki kerangka konseptual yang mapan dalam literatur akademik. Buang A. A. (2021) menjelaskan bahwa partisipasi anggota dalam koperasi masih relatif lemah, sehingga *governance* koperasi cenderung bersifat *top-down*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip demokrasi koperasi belum terintegrasi secara optimal dalam tata kelola organisasi. Otworko J., (2021) juga menegaskan bahwa *governance* koperasi di negara berkembang masih didominasi oleh pendekatan korporatif. Dalam konteks ini, *cooperative governance* belum berkembang sebagai kerangka teoritis yang mandiri. Akibatnya, peran audit dalam *cooperative governance* belum terdefinisi secara jelas. Dengan demikian, celah konseptual dalam pengembangan *cooperative governance* menjadi isu sentral dalam studi koperasi.

Celah konseptual pertama terletak pada pemahaman audit sebagai mekanisme partisipasi anggota. Mukhlisin et al. (2023) menunjukkan bahwa audit internal berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas koperasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan. Namun, audit dalam studi tersebut masih dipahami sebagai fungsi teknis yang dijalankan oleh pengurus dan auditor internal. Hal ini menunjukkan bahwa audit belum diposisikan sebagai proses institusional yang melibatkan anggota koperasi. Candemir S.; Latruffe, L. (2021) juga menunjukkan bahwa audit dalam koperasi pertanian lebih banyak dipahami sebagai mekanisme kepatuhan dan kontrol organisasi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa audit belum dimanfaatkan sebagai instrumen demokrasi anggota dalam koperasi. Dengan demikian, terdapat celah konseptual dalam memahami audit sebagai mekanisme partisipasi dalam *cooperative governance*. Celah ini menunjukkan perlunya redefinisi peran audit dalam kerangka *governance* koperasi.

Celah konseptual kedua terletak pada hubungan antara audit dan akuntabilitas sosial koperasi. Ribas et al. (2022) menjelaskan bahwa koperasi memiliki peran sosial yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan komunitas. Namun, audit dalam literatur koperasi lebih banyak dipahami sebagai mekanisme pelaporan keuangan daripada sebagai mekanisme akuntabilitas sosial. Freire & Gonçalves (2022) juga menunjukkan bahwa *governance* koperasi sering dianalisis melalui pendekatan formal yang menekankan legitimasi organisasi melalui kontrol manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa audit belum dikaitkan secara eksplisit dengan tanggung jawab sosial koperasi terhadap anggota dan komunitas. Dengan demikian, konsep audit dalam koperasi masih bersifat sempit dan teknokratis. Celah ini menunjukkan bahwa literatur koperasi belum mengintegrasikan dimensi sosial audit dalam kerangka *cooperative governance*. Akibatnya, audit belum dipahami sebagai mekanisme akuntabilitas sosial dalam koperasi.

Penelitian ini menawarkan *novelty* dengan mengidentifikasi secara eksplisit tiga celah konseptual utama dalam *cooperative governance*, yaitu celah partisipasi, celah akuntabilitas sosial, dan celah integrasi audit dalam *governance*. Jamaluddin R. A. et al. (2023) menunjukkan bahwa audit dalam koperasi masih diposisikan sebagai mekanisme kontrol manajerial, yang mencerminkan dominasi *corporate governance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa audit belum terintegrasi secara konseptual dalam *cooperative governance*. Penelitian ini melampaui temuan tersebut dengan memetakan celah konseptual secara sistematis dan mengusulkan audit sebagai instrumen integratif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi *gap*, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual untuk menjembatani *gap* tersebut. *Novelty* ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam pengembangan *cooperative governance*. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman audit dalam koperasi dari fungsi teknis menjadi fungsi kelembagaan dan sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual baru yang menempatkan audit sebagai mekanisme kontrol, akuntabilitas, dan partisipasi dalam koperasi. Mainar-Toledo et al. (2022) menjelaskan bahwa *governance* koperasi bersifat hybrid, yaitu kombinasi antara prinsip demokrasi anggota dan mekanisme kontrol korporasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa koperasi berada dalam posisi transisi antara *corporate governance* dan *cooperative governance*. Penelitian ini melampaui kerangka hybrid tersebut dengan menempatkan audit sebagai elemen kunci dalam integrasi demokrasi anggota dan kontrol organisasi. Dengan demikian, audit tidak hanya dipahami sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme institusional yang menghubungkan pengurus,

anggota, dan pemangku kepentingan. *Novelty* ini memberikan kontribusi baru bagi literatur tata kelola koperasi dengan menawarkan model konseptual yang lebih sesuai dengan karakteristik koperasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah konseptual dalam literatur koperasi, tetapi juga menawarkan arah baru bagi pengembangan teori *cooperative governance*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literatur tata kelola koperasi masih didominasi oleh kerangka *corporate governance*, yang memposisikan audit terutama sebagai mekanisme kontrol manajerial dan pelaporan keuangan. Sintesis terhadap artikel-artikel yang dianalisis mengungkap bahwa audit belum dipahami secara komprehensif sebagai bagian integral dari tata kelola koperasi yang berbasis demokrasi anggota. Selain itu, hubungan antara audit dan prinsip-prinsip koperasi, seperti partisipasi anggota dan akuntabilitas sosial, masih kurang dieksplorasi dalam literatur akademik. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan konseptual dalam pemahaman peran audit dalam koperasi. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan audit sebagai elemen strategis dalam pengembangan kerangka *cooperative governance* yang lebih kontekstual dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemetaan konseptual yang lebih jelas mengenai posisi audit dalam tata kelola koperasi.

Lebih lanjut, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mereposisi audit dari sekadar fungsi teknis menjadi mekanisme institusional yang mencakup kontrol organisasi, akuntabilitas anggota, dan legitimasi sosial koperasi. Sintesis temuan menunjukkan bahwa *cooperative governance* belum memiliki kerangka konseptual yang mapan, sehingga audit belum terintegrasi secara sistematis dalam praktik tata kelola koperasi. Melalui pendekatan SLR, penelitian ini mengidentifikasi celah konseptual yang membuka ruang bagi pengembangan model tata kelola koperasi yang lebih holistik dan partisipatif. Temuan ini juga menunjukkan bahwa audit dapat berfungsi sebagai jembatan konseptual antara paradigma *corporate governance* dan *cooperative governance*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tata kelola koperasi, tetapi juga memberikan arah baru bagi pengembangan teori dan praktik *governance* koperasi di masa depan. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya penguatan peran audit dalam membangun tata kelola koperasi yang demokratis dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlemeyer T.; Hisschemöller, M., M. . van der S. (2022). Success factors of citizen energy cooperatives: A comparative study. *Energy Policy*, 162, 112789. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112789>
- Amalina, S., Aditya, M. R., & Pratama, S. A. (2025). Implementasi Audit Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Keberlangsungan Usaha UMKM Pabrik Citra. 1(2), 193–199.
- April, N., Afandi, M. T., & Munir, A. M. (2025). Integrasi Audit Trail dan Pengendalian Internal Terhadap Loyalitas Anggota Koperasi. 3(4), 67–75.
- Boucher M., J. . P. (2024). Scaling renewable energy cooperatives: Governance challenges and opportunities. *Journal of Cooperative Studies*, 57, 45–62. <https://www.uk.coop/resources/journal-co-operative-studies>
- Buang A. A., N. A. . S. (2021). Member participation and governance in cooperatives: Evidence from Malaysia. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 9, 100150. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2021.100150>
- Candemir S.; Latruffe, L., A. . D. (2021). Agricultural cooperatives and farm sustainability: Evidence from European farms. *Journal of Rural Studies*, 83, 313–325. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.02.012>
- Candemir, A., Duvaléix, S., & Latruffe, L. (2021). Agricultural cooperatives and farm sustainability: Evidence from European farms. *Journal of Rural Studies*, 83, 313–325. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.02.012>
- Chali, M., & Lakatos, E. S. (2024). Human resource management and financial performance in

- cooperative enterprises: The mediating role of governance. *Sustainability*, 16, 1245. <https://doi.org/10.3390/su16031245>
- Crabtree E.; Brennan, C., L. . B. (2025). Articulating value in cooperative housing: Governance, participation, and social outcomes. *Housing Studies*, 40, 345–364. <https://doi.org/10.1080/02673037.2024.2398765>
- Dukuhsari, D. (2025). *ANALISIS Efektivitas Pengendalian Internal Dalam Menerapkan Pemberian Pinjaman Pada Koperasi Wanita*. 12(c), 40–49.
- Freire, C., & Gonçalves, T. (2022). Cooperative governance and organizational sustainability. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 93, 921–944. <https://doi.org/10.1111/apce.12345>
- Jamaluddin R. A.; Rahman, A. A., N. . K. (2023). Cooperative governance and cooperative performance: A systematic literature review. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 11, 100181. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2023.100181>
- Lastianti, S. D., Pratiwi, Y. E., Wijayanto, I., Budiarti, I., & Hidayat, U. (2025). Peningkatan Kapasitas Audit Internal Berbasis SIA Di Kopwan Bina Citra Wanita Bringkang Gresik Pendahuluan Koperasi Wanita (KOPWAN). *IJCD : Indonesian Journal of Community Dedication*, 03(02), 255–261.
- Mainar-Toledo, M. D., Salas-Fumás, V., & Vivas-Consuelo, D. (2022). Governance structures in cooperative enterprises: A hybrid model perspective. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 93, 675–698. <https://doi.org/10.1111/apce.12312>
- Mukhlisin, M., Huda, N., & Hidayat, S. (2023). Strengthening cooperative governance through institutional assistance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14, 789–804. <https://doi.org/10.1108/JIABR-2023-0156>
- Nakayiso J., M. . A. (2023). Cooperative enterprises and sustainable development in emerging economies. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 14, 1345–1363. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-2023-0087>
- Novatiani, R. A., Novianto, R. A., Christina, V., Asikin, B., Sarumpet, L., & Widyatama, U. (2023). *Pengaruh tata kelola koperasi terhadap kinerja keuangan*. 5(2), 285–291.
- Novatiani, R., Hidayat, R., & Suryana, Y. (2023). The influence of good corporate governance on financial performance of savings and loan cooperatives. *Journal of Accounting and Investment*, 24, 215–230. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.15347>
- Novianti, N. (2022). Pengaruh audit internal terhadap akuntabilitas koperasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15, 55–68. <https://example.org/novianti>
- Otwoko J., P. . M. (2021). Cooperative governance in emerging economies: Challenges and prospects. *International Journal of Cooperative Management*, 9, 23–35. <https://www.icmjjournal.org>
- Otwoko, P., & Maina, J. (2021). Cooperative governance in emerging economies: Challenges and prospects. *International Journal of Cooperative Management*, 9, 23–35. <https://www.icmjjournal.org>
- Ribas, R. P., Silva, R. S., & Oliveira, M. L. (2022). Cooperative organizations and socio-economic development: Governance and social impact. *Journal of Social Entrepreneurship*, 13, 456–472. <https://doi.org/10.1080/19420676.2022.2034567>
- Sutrisno, B., & Wibowo, A. (2022). Pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja koperasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13, 78–95. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.1.05>